



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak berlakunya otonomi daerah, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik tersebut dibutuhkan sistem akuntansi yang memadai untuk mewujudkan laporan keuangan yang accountable dan transparan kepada para pengguna laporan keuangan dan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat.

Menurut (Subaweh dan Nugraheni 2008), “Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indra Bastian (2005) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik swasta.

Sistem Pemerintahan Daerah terdiri atas 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu penyusunan Laporan Keuangan SKPD harus dilakukan sebaik mungkin. Transaksi yang terjadi di SKPKD diklasifikasikan sebagai transaksi satuan kerja dan transaksi pada level pemda dimana sistem akuntansi pemerintahan daerah pada SKPKD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertugas menyusun laporan keuangan daerah.

Dalam Dinas Pendidikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah menggunakan transaksi-transaksi akuntansi. Akuntansi merupakan suatu transaksi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan mencatat serta melaporkan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan.

Catur (2010:2) menyatakan bahwa anggaran merupakan rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jualnya untuk tahun depan. Adapun tujuan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan
- b. Koordinasi
- c. Motivasi
- d. Pengendalian

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, penyelenggaraan akuntansi pemerintahan.

Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintahan Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintahan daerah diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan pada kota pekanbaru khususnya pada Dinas pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Mendagri.

Sistem Akuntansi Pemerintahan pekanbaru juga mengacu pada pemda dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pedoman umum ini diperlukan untuk rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD dalam rangka melaksanakan tugas-tugas desentralisasi. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan yaitu 100% menjadi 98% karena berjalannya waktu dan aktivitas-aktivitas yang tidak terduga maka realisasi anggaran tidak sesuai dengan yang dianggarkan.

Berdasarkan pembahasan yang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian, dengan judul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 Pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru”**.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru?
- b. Apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan ?
- c. Bagaimana perbandingan Realisasi Anggaran dari tahun 2017 dengan tahun 2016?



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru?
- b. Apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan?
- c. Untuk mengetahui perbandingan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2016 dan tahun 2017?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diketahui penulis adalah sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

Untuk memperluas wawasan dan ilmu tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan kota Pekanbaru.

Untuk syarat Tugas Akhir kuliah selama mengabdikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan informasi tambahan bagi penulis berikutnya yang ingin meneliti permasalahan Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Realiasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan kota Pekanbaru.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendidikan Jl. Pattimura No. 40 A, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail Pekanbaru Riau.

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer penulis dapatkan melalui wawancara secara langsung dengan pegawai pada Dinas Pendidikan pada bagian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Data Sekunder

Data sekunder penulis dapatkan dengan cara studi perpustakaan, beberapa Tugas Akhir, Skripsi, serta berupa struktur organisasi dan gambaran umum



perusahaan dan mengupdate di internet sebagai referensi dalam menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan judul yang diteliti penulis.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah kegiatan dimana peneliti melibatkan dirinya secara langsung pada situasi yang diteliti dan secara sistematis mengamati berbagai dimensi yang ada termasuk interaksi, hubungan, tindakan, kejadian, dan sebagainya. Dengan begitu, pada waktu pengumpulan data, peneliti berperan serta terhadap objek yang diteliti yaitu penerapan analisis sistem akuntansi pemerintah pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dimana penulis langsung melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk membaca, mempelajari serta menelaah beberapa sumber tertulis dari buku-buku bacaan, artikel, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas.

1.5 Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu meneliti dan membahas data yang ada kemudian menganalisis data dengan membandingkan kenyataan pada dinas dengan teori yang telah dipelajari kemudian dari analisis ini ditarik kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dimasa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini terbagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun pokok permasalahan tiap bab tersebut akan penulis uraikan dalam garis-garis besarnya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Dinas Pendidikan kota Pekanbaru

BAB III : URAIAN DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 baik secara teori maupun secara praktek.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dalam penelitian yang memuat kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan juga

memuat saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi Dinas Pendidikan kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

